

BAB II

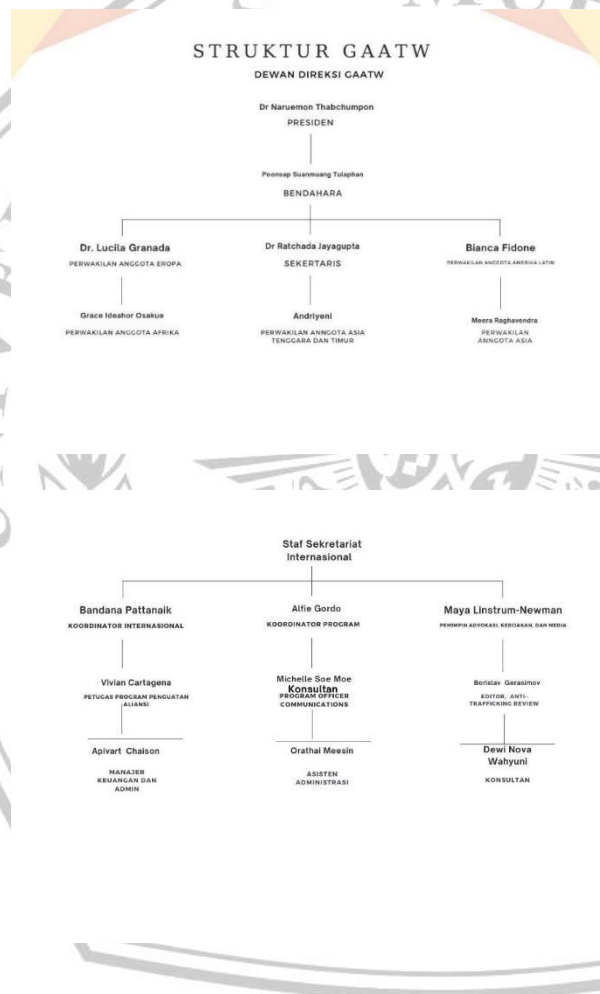
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDIA

Trafficking atau perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pusat penerimaan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, menjerat hutang atau memberi pembayaran atau keuntungan, sehingga mendapat persetujuan dari orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik yang dilakukan antar negara ataupun antar negara untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. terjadinya trafficking adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, pendidikan yang relatif rendah, patriarki. Budaya yang kemudian mendorong motivasi perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhannya sebagai pekerja low skill. Korban trafficking kurang mendapat perlindungan hukum, oleh karena itu pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kasus woman trafficking di india serta negara yang mejadi tujuan woman trafficking serta bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus woman trafficking di india.

2.1 Profil GAATW

Global alliance against Trafficking women adalah sebuah organisasi global yang didirikan di Chiang Mai, Thailand pada tahun 1994. adalah salah satu dari lebih dari 100 organisasi non-pemerintah di Asia, Amerika Latin dan Amerika Utara. Sekretariat internasional utama GATW berbasis di Thailand dan mengoordinasikan kegiatan Aliansi, mengumpulkan informasi dan membela kepentingan Aliansi di tingkat internasional.

Organisasi anggotanya antara lain organisasi advokasi migran, organisasi anti perdagangan manusia dan merupakan organisasi masyarakat dan merupakan kelompok yang mengatur hak-hak mereka , terdiri dari pekerja migran, pekerja rumah tangga, penyintas perdagangan manusia dan seks, hak-hak perempuan dan penyedia layanan langsung.³⁸



Sumber gambar : <https://bit.ly/3BJqDFy>

³⁸ Fadil Budi Ghiffari, “Efektivitas Kerja Sama Interpol-Gaatw Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Jepang,” *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 304–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite>:<http://www.fisip.undip.ac.id>.

Organisasi anggota terdiri dari organisasi non-pemerintah yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan sesuai dengan prinsip GAATW. Anggota berkontribusi pada agenda strategi Aliansi. Ketika organisasi anggota bekerja sama, aksi kolektif sering kali berkisar pada advokasi, berbagi diskusi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dan inisiatif peningkatan kapasitas. Masalah dan kegiatan prioritas diidentifikasi, disetujui dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Internasional. Cabang regional dapat didirikan oleh anggota untuk mengoordinasikan kegiatan regional mereka sendiri. GAATW saat ini memiliki satu cabang regional, GAATW-REDLAC, Cabang GAATW di Amerika Latin dan Karibia, terdiri dari 10 organisasi dari Argentina , Brasil , Chili , Kolombia, Guatemala , Peru dan Trinidad dan Tobago.³⁹

Dewan Direksi GAATW bertemu setahun sekali dan memantau pelaksanaan rencana strategis dan fungsi Sekretariat Internasional (IS) dalam hal ini dan memberikan persetujuan akhir kepada Rencana Kegiatan Cabang Regional. Dewan ini menominasikan anggota IB baru, dan Komite Eksekutif (Ex-Co), yang secara langsung mengawasi jalannya IS sehari-hari berkenaan dengan masalah keuangan, personel, dan hukum. Berdasarkan Statuta Saat Ini, komposisi anggota IB diamanatkan untuk mencerminkan representasi dari berbagai kawasan dunia dan pengalaman profesional.

³⁹ Global alliance against Trafficking women Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW), diakses dalam <https://gaatw.org/about-us/gaatw-structure> (03/12/2024, 10:43 WIB). (GAATW).

Sekretariat Internasional GAATW berpusat di Bangkok, Thailand. Fungsi utamanya adalah untuk melayani dan mendukung anggota Aliansi dengan:

- 1) Membuat isu-isu lokal terlihat secara internasional dan mendukung Anggota dalam upaya advokasi mereka
- 2) Membantu menerapkan kebijakan dan standar internasional secara lokal
- 3) Menghasilkan bukti, penelitian dan analisis mengenai isu-isu yang berdampak pada pekerja migran perempuan
- 4) Memfasilitasi representasi Anggota di tingkat lokal, regional, dan internasional pada forum-forum yang relevan
- 5) Membangun, memfasilitasi dan memelihara pertukaran, komunikasi dan pembelajaran bersama dengan dan di antara anggota Aliansi
- 6) Mengumpulkan, mengolah, menyebarluaskan dan menyediakan dengan mudah kepada para anggota dokumen-dokumen penting mengenai perdagangan manusia, serta informasi-informasi yang relevan secara umum, dalam rangka mendukung kegiatan mereka
- 7) Mengembangkan dan menyediakan sumber informasi tentang perdagangan manusia, gender, globalisasi dan ekonomi informal, advokasi berbasis hak asasi manusia, dan metodologi penelitian

- 8) Memfasilitasi pengembangan kapasitas dan menyelenggarakan sesi kejelasan konseptual untuk anggota Aliansi maupun non-anggota berdasarkan permintaan.⁴⁰

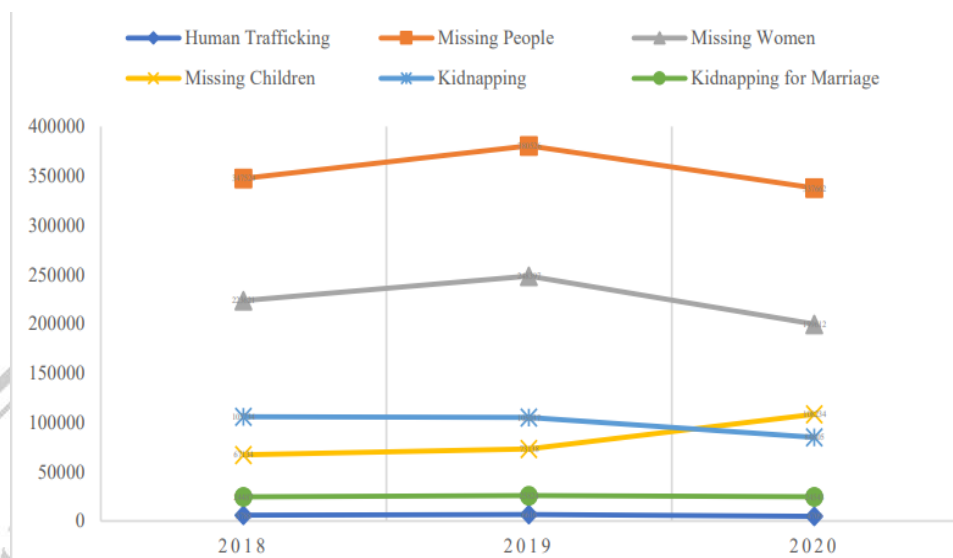
2.2 Kasus Woman Trafficking di India

Menurut *Natioal Crime Records Bureau* (NCRB) India, lebih dari 6.500 korban perdagangan manusia terutama perempuan telah diidentifikasi di negara tersebut pada tahun 2018-2022 60% di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Para ahli yakin jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena kurangnya pelaporan yang belum banyak terdata secara rinci.⁴¹ Di Asia Selatan, UNODC *United Nations Office on Drugs and Crime*, adalah salah satu unit Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan, mereka menjelaskan bahwa India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan adalah asal negara dengan jumlah perdagangan perempuan tertinggi. Tidak hanya itu, India dan Pakistan menjadi negara dengan urutan tertinggi pemasok perdagangan perempuan yang berasal dari kawasan Asia Selatan. Sebanyak 150.000 perempuan diperdagangkan ilegal melalui jaringan-jaringan kejahatan internasional. Data yang diterbitkan oleh Pemerintah India melalui *National Crime Records Bureau* (NCRB) pada 2018 hingga 2022 mengungkapkan bahwa angka kejahatan dalam kaitannya dengan perdagangan manusia

⁴⁰ Asiva Noor Rachmayani, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.

⁴¹ Aziz, S. 2023. In India, Human Traffickers Target Tribal Women and Girls. VOA News, <https://www.voanews.com/a/in-india-human-traffickers-target-tribal-women-and-girls/7235083.html>

meningkat signifikan. Berikut akan penulis tampilkan data peningkatan kasus perdagangan orang terutama kejahatan terhadap perempuan di India pada tahun 2018 hingga 2020.



Gambar 2.1 Grafik Data NCRB Tentang Jenis Kejahatan yang Dilaporkan di India 2018-2020

Sumber: National Crime Records Bureau

Biro Kejahatan Nasional India, NCRB melaporkan laporan tahunan mereka dengan laporan khusus tentang Perempuan dan Anak Hilang. Data dipilih dari tahun 2018 hingga 2020, dengan membandingkan jumlah kasus dan korban dari tahun-tahun sebelumnya dengan kejahatan lain yang memiliki karakteristik serupa. Terdapat banyak jenis kejahatan mulai dari perdagangan manusia, kasus kehilangan yang dibagi menjadi dua jenis: kehilangan perempuan dan anak-anak. Selain itu, terdapat kejahatan berupa penculikan dan penculikan untuk dinikahkan. Pada kategori orang hilang, kami mencatat per 2018, 347.525 orang yang terlibat, dan ini terus meningkat pada tahun 2019

hingga mencapai 380.526, hingga terjadi sedikit penurunan sebesar 337.662 pada tahun 2020, diantara jenis-jenis kejahatan orang hilang, NCRB membaginya menjadi dua jenis: perempuan hilang dan anak hilang. Pada jenis kejahatan terkait perempuan hilang, grafiknya menunjukkan, pada tahun 2018 terdapat satu kasus yaitu 223.621, angka tersebut meningkat menjadi 248.397 dan sedikit menurun menjadi 199.612. Untuk kategori anak hilang, jumlahnya perlahan meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, berikut statistiknya : 67.134, 73.138, 108.234.⁴²

Data perdagangan perempuan dan anak-anak di setiap negara, termasuk India, merupakan publikasi resmi. Estimasi tentang skala perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak-anak dalam banyak kasus, polisi tidak mendaftarkan kasus-kasus di bawah hukum perdagangan manusia. Banyak kasus mungkin tidak terdeteksi karena penjahat beroperasi secara online menggunakan situs jejaring sosial. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali kasus yang belum teridentifikasi terkait dengan jumlah kasus perdagangan perempuan di India itu sendiri dikarenakan saat ini para pelaku sudah pintar banyak yang menggunakan situs agar kejahatan mereka tidak dapat teridentifikasi dengan mudah oleh pemerintah.⁴³

COVID-19 membuat perempuan dan anak-anak rentan terhadap perdagangan. Aktivis LSM menyampaikan bahwa meskipun pembatasan

⁴² Niall McCarthy. 2018. *The Ten Countries Where It's Worst to be Female*, Thomson Reuters Foundation, Statista Charts

⁴³ Melia Maharani Asnur, "Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Masalah Pekerja Anak Di Vietnam Tahun 2015-2020," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 11, no. 2 (2023): 274–88.

COVID-19 diberlakukan di berbagai tempat, kasus perdagangan perempuan dan anak-anak terus meningkat tanpa hambatan.⁴⁴ Seorang korban bernama Pooja (samaran) pada 2020 yang diculik oleh penyelundup anak ketika India mulai keluar dari lockdown nasional karena pandemi. Pooja dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama satu tahun. Ia diselamatkan oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Sumber Daya Tenaga Kerja Bihar, sebuah LSM yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak-anak. Pooja menceritakan bahwa ia disiksa oleh majikannya, yang biasa memukulnya tiga kali sehari dengan alasan apa pun. Dia memiliki lebam di tubuhnya ketika diselamatkan pada 4 Juni 2021 oleh LSM tadi.

Statista Research Department memaparkan jumlah kasus perdagangan manusia yang dilaporkan ke India pada tahun 2021 berdasarkan negara bagian. Pada tahun 2021, lebih dari 1000 kasus perdagangan manusia dilaporkan dengan hampir tiga ribu korban di seluruh India, Negara bagian Maharashtra memiliki jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi dengan lebih dari 260 kasus. Urutan selanjutnya diikuti oleh Assam, Odisha, Telangana, Jharkhand, Delhi, dan Kerala. Data ini dirilis pada Agustus 2022 per periode survei 2021. Sedangkan Chandigarh, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur, Jammu & Kashmir hanya memiliki satu kasus perdagangan manusia. Data yang ditulis oleh *Trafficking in Persons Report* pada tahun 2022 menjelaskan

⁴⁴ Sushmita Ghosh. 2021. *Covid-19 made poor more vulnerable to child trafficking, say NGOs*, India Today, New Delhi, <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/covid-19-poor-marginalised-vulnerability-child-trafficking-ngos-1812519-2021-06-08>

bahwa korban perdagangan manusia 41 persennya adalah anak-anak dan 59 persennya adalah perempuan.⁴⁵

Volume perdagangan perempuan di India dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi pada kurun waktu tersebut. Alasan perdagangan tersebut antara lain dilakukannya kerja paksa, eksploitasi seksual, domestik penghambaan, kawin paksa, mengemis, pengambilan organ tubuh, pornografi anak, dan lain-lain. Berikut jumlah perdagangan wanita di India kurun waktu 2018 sampai 2023⁴⁶

Pemerintah mempertahankan upaya perlindungan secara keseluruhan, meskipun identifikasi korban menurun dan layanan untuk korban tetap tidak memadai. Pemerintah pusat mengandalkan negara bagian untuk memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia. Pemerintah pusat dan negara bagian menawarkan tempat penampungan dan layanan bagi perempuan dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia.⁴⁷

Tingginya kasus perdagangan perempuan atau *trafficking* ini sangat meresahkan terbukti dengan tingginya angka jumlah perdagangan perempuan ini setiap tahunnya yang mana melibatkan pemaksaan penipuan atau

⁴⁵ Statista. 2022. *Number of Reported Human Trafficking Cases in India 2021 by State*, Statista Research Department, Crime & Law Enforcement. <https://www.statista.com/statistics/633086/reported-human-trafficking-cases-by-state-india/>

⁴⁶ Dakua, T; Rahaman, M; Das, K.C. 2024. *An analysis of the spatial and temporal variations of human traffickin In India*. Cogent Social Science.

⁴⁷ Bhattacharya, Jayanta. 2023. *Human Trafficking: The Alarming Case of India's Missing Girls and Women*. Tatsat Chronicle Social Sector On Record. <https://tatsatchronicle.com/human-trafficking-the-alarming-case-of-indias-missing-girls-and-women/>

penculikan khususnya perempuan dan anak untuk digunakan dengan tujuan eksploitatif, perdagangan perempuan atau juga dikenal dengan *woman trafficking* biasanya juga tidak segan menggunakan ancaman kekerasan serta manipulasi yang mana untuk mengendalikan para korban hal itu tentu masih menjadi permasalahan di India saat ini.⁴⁸

Kejahatan terhadap perempuan adalah kejahatan paling umum keempat terhadap perempuan di India. Menurut laporan tahunan Catatan Kejahatan Nasional tahun 2021, tercatat 31.677 kasus pemerkosaan di negara tersebut, yaitu rata-rata masing-masing 86 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 28 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terus meningkat hingga terdapat 32.033 kasus. Dari total 31.677 kasus pemerkosaan, 28.147 di antaranya dilakukan oleh orang yang dikenal korban yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah.⁴⁹

Tabel 2.1 Woman Trafficking in India 2018 - 2023

Tahun	Jumlah woman trafficking
2018	1.714
2019	2.189
2020	3.800
2021	28.046
2022	28.811
2023	31.677

Sumber: ⁵⁰NCRB kasus woman trafficking di India

⁴⁸ Sosial Justice. 2023. *Rehabilitation Scheme for Victims of Trafficking*. <https://www.drishtiiias.com/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/06-07-2023>

⁴⁹ Singh, Abhay. 2024. *No. of trafficking victims rescued rises 22% in 2023*. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/increase-in-rescued-trafficking-victims-by-22-in-2023/articleshow/109739638.cms>

⁵⁰ NCRB, "No Title," 2022, <https://ncrb.gov.in/>.

India digambarkan sebagai salah satu negara dengan tingkat pemerkosaan per kapita tertinggi. Pemerintah juga mengklasifikasikan seks dalam janji pernikahan palsu sebagai pemerkosaan. Setelah beberapa insiden mendapat perhatian media dan memicu protes masyarakat lokal dan nasional. Menurut statistik NCRB 2021, Rajasthan memiliki jumlah pemerkosaan tertinggi di antara negara bagian, diikuti oleh Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh. Di antara kota-kota metropolitan, ibu kota negara Delhi terus memiliki tingkat pemerkosaan tertinggi kasus pada tahun 2021 sampai 2023, sementara Jaipur memiliki tingkat pemerkosaan tertinggi. Kolkata memiliki kasus pemerkosaan paling sedikit yang terdaftar di antara kota-kota metropolitan dengan tingkat pemerkosaan terendah.⁵¹

2.3 Negara Tujuan *Woman Trafficking* India

India dinilai rentan terhadap kekerasan seksual meliputi beberapa indikator sebagai berikut kasus pemerkosaan, kerja paksa, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual. India menjadi negara paling berbahaya bagi perempuan pada tahun 2018, diikuti oleh negara-negara yang dilanda perang seperti Afghanistan dan Suriah yang menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam studi tersebut. Sementara penambahan yang cukup mengejutkan ada pada peringkat 10 yaitu Amerika Serikat. Menurut para ahli, Amerika Serikat

⁵¹ NCRB (National Crime Records Bureau), "Data NCRB Tentang Perdagangan Manusia," 2022, <https://ncrb.gov.in/en/inauguration-ncrb-new-building-mahipalpur-honble-union-home-minister>.

masuk dalam daftar sepuluh negara paling berbahaya bagi perempuan karena kampanye #MeToo dan Time's Up mendominasi headline surat kabar dan liputan media selama berbulan-bulan.⁵²

Perempuan India diperdagangkan ke Timur Tengah untuk eksploitasi seksual komersial yaitu ke Bangladesh, Ethiopia, Nepal, dan Sri Lanka, dan sejumlah kecil dari Benin, Guinea, dan Filipina. Serta sebagian besar, Negara-negara Kerja Sama Teluk (GCC), Lebanon, dan Yordania. Setiap migran India yang bermigrasi dengan sukarela ke Timur Tengah dan Eropa untuk bekerja setiap tahunnya sebagai pembantu rumah tangga dan buruh berketerampilan rendah dan sebagian dari mereka juga menjadi bagian dari industri perdagangan perempuan. Dalam survei terbaru di India, perempuan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dengan berbagai alasan. Dalam urutan kepentingannya, hal-hal tersebut adalah kemiskinan dan pengangguran kurangnya layanan reintegrasi yang tepat, kurangnya pilihan; stigma dan merugikan sikap sosial.⁵³

India adalah negara asal, transit dan tujuan bagi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan antar negara bagian mewakili 89% perdagangan manusia untuk

⁵² Annalee Lepp, "Trafficking in Women and the Feminization of Migration: The Canadian Context," *Canadian Woman Studies*, 2002, 90–99, http://ezproxy.lib.ucalgary.ca/login?url=http://search.proquest.com/docview/217455959?accountid=9838%5Cnhttp://dc8qa4cy3n.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/ProQ%3Acbcacomplete&rft_val_fmt=info:ofi/.

⁵³ Saraswati, Raju Iyer dan Radha. 2016. *Women trafficking in india - a critical analysis*, India Today, New DelhShanlax International Journal of Arta, Science & Humanities, www.shanlaxjournals.in/pdf/ASH/V4N2/Ash_V4_N2_017.pdf

tujuan eksploitasi seksual di India merupakan negara asal utama, transit serta tujuan. Negara bagian pemasok terbesar adalah: Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Benggala Barat, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra dan Uttar Pradesh. Disusul oleh negara bagian Orissa, Rajasthan, dan Jharkhand. Bihar, Maharashtra dan Madhya Pradesh memiliki perbedaan yang meragukan sebagai negara bagian dengan jumlah anak perempuan di bawah umur terbanyak. Pembeli anak di bawah umur terbesar adalah Bengal dan Maharashtra. Tujuan utama termasuk Delhi, Benggala Barat, Gujarat, Punjab dan Haryana. Kota-kota seperti Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore, dan Hyderabad memiliki konsentrasi pelacur tertinggi.⁵⁴

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang data individu pekerja seks di India yang mencakup latar belakang beserta alasan mengapa memilih atau berakhir berkarir menjadi pekerja seks di India.

Tabel 2.2 Data Survey Pekerja Seks Komersil di India

Keterangan	Kasus 1 Shallot	Kasus 2 Omana	Kasus 3 Chinnu	Kasus 4 Manju
Umur	35 tahun	50 tahun	26 tahun	42 tahun
Latar Belakang Keluarga	Shallot merupakan seorang janda, dan memiliki anak berusia 17 tahun, dan anaknya merupakan individu	Omana mempunyai dua anak yang sudah menikah, Suaminya meninggalkan dia ketika diumur 20 tahun. Omana sekarang hidup sendirian	Chinnu tinggal jauh dari keluarganya, dia mempunyai pengalaman buruk, yakni pernah dilecehkan	Manju memiliki pasangan yang dulunya juga merupakan pekerja seks, dan manju memiliki anak perempuan yang sedang

⁵⁴ Ollus, Natalia., & Nevala, Sami. (2001). *Women in the criminal justice system : international examples & national responses*. European Institute for Crime Prevention and Control, affiliate with the United Nations (HEUNI), hal 116.

	yang berbakat dalam bidang olahraga dan telah mendapatkan banyak beasiswa		oleh anggota keluarganya termasuk ayahnya di masa mudanya.	menempuh pendidikan kelas 3 SMA
Lama durasi menjadi pekerja seks	14 tahun	20 tahun	6 tahun	22 tahun
Penghasilan per hari	1000 – 3000 Indian Rupee	500 – 1000 Indian Rupee	2000 – 4000 Indian Rupee	500 – 2000 Indian Rupee
Alasan memilih bekerja menjadi pekerja seks	Shallot telah hamil diluar nikah saat usianya masih sangat muda, ia kemudian ditelantarkan oleh keluarganya dan terjerat permasalahan ekonomi.	Setelah suaminya meninggalkannya, Omana mencoba beberapa pekerjaan termasuk dengan menjual sayur-sayuran, kerajinan rumahan, dll. Namun pemasukannya sangat kecil dan tidak cukup untuk menafkahi anaknya, dan Omana pun tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari keluarganya, sehingga ia terpaksa untuk memulai sebagai pekerja seks	Chinnu memilih menjadi pekerja seks, lantaran pekerjaan ini membuat dia mendapatkan uang dan kenikmatan	Manju berasal dari kalangan nelayan di Kerala. Berdasarkan pengalaman manju di lingkungannya ketika ia remaja, banyak wanita yang memilih menjadi pekerja seks komersil, sehingga Manju terpengaruh untuk menjadi pekerja seks komersil.

Sumber: Artikel Jurnal “*Legalization of Sex Work in India: Perspectives on Changes in Socio-Economic and Living Conditions of Female Sex Workers*”, oleh

Amritha, Babu, Ashifa, 2023, *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(4S), hal. 413-414.

Broker atau penyalur pekerja seks biasanya adalah anggota masyarakat yang dikenal oleh korban atau keluarga korban yang mengaku membantu keluarga tersebut, petugas mencari bantuan dari masyarakat setempat untuk keluarga dan korban individu yang siap menculik calon korban dan anggota keluarga, istrinya dilacurkan langsung oleh suaminya atau ditelantarkan/diceraikan, dijual kepada calo yang akan menjualnya kembali. Praktek ini telah didokumentasikan di Bihar, Bengal, Chhatisgarh, Orissa, Uttaranchal dan Hyderabad.⁵⁵

Anak jalanan sangat rentan terhadap eksploitasi seksual ini. Biaya per tindakan seksual bervariasi dari 50 hingga Rs India dan dapat mencapai hingga 100 IRN 1.000 korban bermalam dengan kliennya atau Wisata seks tersebar luas di segitiga , di yaitu sabuk Agra-Delhi-Jaipur, serta di selatan dan barat daya India Goa, Maharashtra, Kerala, di Tamil Nadu dan Orissa. Himachal Pradesh dan Rajasthan merupakan destinasi baru untuk wisata seks. Wisata seks dapat difasilitasi oleh agen perjalanan, operator tur, hotel dan usaha terkait. Ada juga bukti anak laki-laki yang diimpor dari negara-negara Teluk ke India bagian selatan dan terlibat dalam prostitusi. Prostitusi tidak lagi terbatas pada rumah bordil tradisional yang dapat ditemukan di lokasi-lokasi

⁵⁵ Sahni, R., Shankar, V. K., & Apte, H. (2008). *Prostitution and beyond: An analysis of sex work in India*. In *Prostitution and Beyond: An Analysis of Sex Work in India*. SAGE Publications Inc, hal 49.
<https://doi.org/10.4135/9788132100362>

baru , seperti rumah bordil keliling, bar dansa , layanan pendamping, klub persahabatan, panti pijat dan pemandian umum di sepanjang jalan raya nasional.⁵⁶

Perdagangan perempuan dan anak-anak menyebabkan kesengsaraan yang tak terhitung karena melanggar hak asasi manusia hak dan martabat individu dalam beberapa cara. Itu melanggar hak individu untuk hidup, martabat, keamanan, privasi, kesehatan, pendidikan dan penyelesaian keluhan. Perdagangan keduanya untuk tujuan seksual komersial eksploitasi dan eksploitasi berbasis non-seks merupakan tantangan transnasional dan kompleks ini adalah kegiatan kriminal terorganisir, suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrim dan merupakan sebuah isu pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial.⁵⁷

2.4 Upaya Pemerintah India dalam Menangani Kasus *Woman Trafficking*

Kasus *woman trafficking* di India menjadi perhatian serius di negaranya. India tidak hanya tinggal diam dalam mengatasi isu ini. Meski dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks, India melakukan beberapa usaha untuk menangani tingginya kasus *woman trafficking*. Pada Mei 2011 pemerintah India yaitu GK Pillai sekretaris pemerintah dalam negeri meratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta turut mendukung upaya PBB (perserikatan

⁵⁶ "No Ti," *International Journal for Equity in Health*, no. sexual slavery without borders:traficcking for commercial sexual exploitation in india (2008): 4–9.

⁵⁷ *Ibid*, 42

bangsa bangsa) yang menentang kejahatan terorganisir transnasional dengan protokol (UNTOC) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. India merupakan salah satu dari lima negara di Asia Selatan, termasuk Afghanistan, Pakistan, dan Sri Lanka, serta baru-baru ini Nepal, yang meratifikasi UNTOC. Yang mana UNTOC diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003.⁵⁸

Pemerintah India yaitu GK Pillai sekretaris pemerintah dalam negeri meratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta turut mendukung upaya PBB (perserikatan bangsa bangsa) yang menentang kejahatan terorganisir transnasional dengan protokol (UNTOC) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. India merupakan salah satu dari lima negara di Asia Selatan, termasuk Afghanistan, Pakistan, dan Sri Lanka, serta baru-baru ini Nepal, yang meratifikasi UNTOC. Yang mana UNTOC diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Konvensi ini merupakan instrumen dari pemerintah India serta PBB yang mana salah satunya yaitu Protokol untuk Mencegah, serta Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. melalui promosi kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir transnasional. Biro Investigasi Pusat Pemerintah India telah menjadi otoritas utama untuk menerima dan menanggapi semua permintaan bantuan sebagai satu-satunya titik kontak yang bertindak sebagai penghubung antara Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pihak Negara lain

⁵⁸ Adriani, H. S. N dharjono. 2023. Efektivitas Ratifikasi UNTOC Terhadap Tingkat Kriminalitas *Human Trafficking* India Tahun 2014-2018. *Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 27(1)

mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Konvensi dan Protokol. India berkesempatan untuk menjadi Pihak dalam negosiasi mendatang terkait masalah tersebut dan memastikan bahwa resolusi yang diadopsi berdasarkan Konvensi/Protokol tersebut sesuai dengan kepentingan jangka panjang negara tersebut.⁵⁹

1. Meratifikasi UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).

Human trafficking dalam politik internasional dipandang sebagai salah satu kejahatan transnational (*transnational crime*) yang artinya, sudah menjadi perhatian di politik internasional. India sebagai salah satu negara yang memiliki masalah *human trafficking* juga memiliki perhatian khusus mengenai isu ini. Untuk itu, India menandatangani *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di tahun 2003. Di dalam UNTOC, terdiri beberapa protokol dimana protokol ini disebut juga dengan Protokol Palermo. Berikut isi dari ketiga protokol tersebut:

- a. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak)

⁵⁹ united nation treaty collection, "No Title," 2003, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18.

- b. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* (Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara)
- c. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (Protokol melawan Manufaktur Terlarang dari Perdagangan Senjata Api Secara Ilegal, Suku Cadang dan Komponen serta Amunisinya)
2. Pemerintah India telah menandatangani Nota Kesepahaman yang diresmikan dan berlaku mulai 25 Desember 2003, India dengan Bangladesh, UEA (uni emirat arab) dan Kamboja tentang pencegahan Perdagangan Manusia dan juga telah meratifikasi protokol Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*). tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak. Pemerintah melalui UNTOC mengeluarkan surat peringatan yang dapat mencegah perdagangan perempuan yang melibatkan beberapa pihak antara lain.⁶⁰
- a. Imbauan kepada Negara Bagian (*state*) dan UT (*unit teritory*) untuk melakukan sosialisasi kepada personel polisi yang ditempatkan di depo bus/terminal bus yang dikeluarkan pada tahun 2018. Peringatan ini

⁶⁰ Ministry of Home Affairs (Government of India). *Anti Trafficking Cell*. https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/anti-trafficking-cell

melibatkan Direktur umum polisi di seluruh pemerintahan India dan Inspektur/Komisaris Polisi seluruh wilayah teritori.

- b. Pedoman pembentukan dan penguatan satuan tugas anti perdagangan orang di seluruh Negara India yang dikeluarkan pada tahun 2019. Pedoman ini melibatkan Sekretaris Utama (dalam Negeri) seluruh Pemerintahan Negara Bagian dan Wilayah Persatuan
- c. Saran bagi Negara Bagian dan UT untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat respons penegakan hukum untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia selama COVID 19 yang dikeluarkan pada 07 Juni 2020. Peringatan ini melibatkan Sekretaris Utama (dalam Negeri) seluruh Pemerintahan Negara Bagian dan Wilayah Persatuan serta Direktur Jenderal Kepolisian seluruh Negara Bagian
- d. Saran bagi Negara Bagian dan UT (*unit teritory*) untuk membangun mekanisme Kelembagaan untuk mencegah dan melawan perdagangan manusia di berbagai tingkatan – Kantor Pusat Negara Bagian, Distrik, Kantor Polisi yang dikeluarkan pada 12 Januari 2020. Peringatan ini melibatkan Sekretaris Utama (dalam Negeri) seluruh Pemerintahan Negara Bagian dan Wilayah Persatuan serta Direktur Jenderal Kepolisian seluruh Negara dan UT (*unit teritory*).
- e. Imbauan kepada Negara Bagian (*state*) dan UT (*unit teritory*) untuk mengadakan Konferensi Tingkat Negara Bagian tentang Perdagangan Manusia yang dikeluarkan pada 21 Juli 2022. Peringatan ini melibatkan Sekretaris Utama Tambahan/Sekretaris Utama/Sekretaris Departemen

Dalam Negeri seluruh Negara Bagian & UT seorang Direktur Jenderal (Polisi) seluruh Negara Bagian dan UT

- f. Himbauan kepada Panitera Umum semua Pengadilan Tinggi untuk menyelenggarakan Kolokium Yudisial tentang Perdagangan Manusia yang dikeluarkan pada 21 Juli 2022. Peringatan ini melibatkan Panitera Jenderal semua Pengadilan Tinggi
- g. RoD Pertemuan Pejabat Nodal Perdagangan Manusia yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 2022 memperbarui mereka tentang berbagai masalah yang melibatkan perdagangan manusia yang dikeluarkan pada 23 Agustus 2022. Peringatan ini melibatkan Direktur Jenderal (Polisi) seluruh Negara Bagian dan UT.

3. *Indian Penal Code (IPC)*

Pada tahun 2013, India mengamandemen Undang-Undang hukum Pidana yang disahkan oleh Lok Sabha dan Rajya Sabha pada bulan Maret 2013 yang mengatur amandemen KUHP India, Undang-Undang Bukti India, dan KUHP, 1973 tentang hukum yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan perdagangan manusia yaitu Lok Sabha Secretariat pada 2013 Undang-Undang Amandemen 2013 ini kemudian melahirkan rincian mengenai hukuman tentang perdagangan manusia yang ditambahkan dalam IPC (indian penal code) dalam pasal 366 A, 366 B, 370, 372, dan 373 dimana kelima pasal ini menjelaskan secara rinci definisi, cara, dan hukuman untuk pelaku perdagangan manusia.

Kementerian Hukum dan Keadilan (Departemen Legislatif) tahun 2018 mengamandemen Undang-undang Parlemen berikut mendapat persetujuan Presiden pada 11 Agustus 2018 dan memberikan informasi umum. Amandemen ini terkait perlindungan Anak dari pelanggaran seksual. Hal ini dilakukan karena hukum tersebut tidak memuat semua pelanggaran dan ada kemungkinan bahwa beberapa pelanggaran mungkin masih tertinggal dari hukum, yang tidak dimaksudkan untuk dikecualikan dari konsekuensi pidana. Serta beberapa undang-undang pidana yang mengatur berbagai pelanggaran telah dibuat sebagai tambahan pada hukum tersebut.⁶¹

4. Mendirikan Anti *Human Trafficking* Unit (AHTU)

Untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang masih marak, India juga membentuk kesatuan khusus yang bernama Anti Human Trafficking Unit (AHTU). Badan ini dibentuk pada tahun 2007. Pembentukan AHTU juga diselenggarakan dengan adanya pelatihan dan perekrutan petugas dari kepolisian dan jaksa. AHTU memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berbeda dengan kepolisian lokal, sehingga bisa dikatakan jauh lebih efektif dari polisi lokal dalam penanganan perdagangan perempuan. Efektivitas AHTU dapat dilihat dari Kasus Tithi Das pada tahun 2017 yang diperdagangkan dari West Bengal ke Gujarat. Kepolisian lokal tidak mampu untuk menangani hal ini dan

⁶¹ Ministry of Law and Justice. 2018. *The Criminal Law (Amendment) Act*. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-02/CSdivTheCriminalLawAct_27022023.pdf

melimpahkannya ke AHTU yang kemudian ditindak lanjuti dengan investigasi menyeluruh, dari penyelidikan tempat pertama Tithi diperdagangkan (*ground zero*) hingga mengungkap penadah dari kasus perdagangan manusia di Gujarat yang akhirnya mendapat bukti kuat dan pelaku mendapatkan hukuman dalam persidangan.⁶²

Sejak Indeks Perbudakan Global (GSI) tahun 2018, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan responsnya terhadap perbudakan modern, termasuk melalui penguatan kapasitas Unit Anti-Perdagangan Manusia (AHTU) dan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam upaya penanggulangannya. Pemerintah harus memperkuat upaya untuk mengatasi penyebab utama perbudakan modern, mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili kejahatan perbudakan modern, dan memastikan tersedianya dukungan dan kompensasi bagi para penyintas⁶³.

Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah mekanisme untuk mengidentifikasi dan mendukung para penyintas. Misalnya, Biro Investigasi Pusat mengoperasikan saluran telepon darurat 24/7 bagi masyarakat untuk melaporkan perdagangan manusia. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MWCD)

⁶² Fatma Yusuf Eko Suwarno, "Perdagangan Perempuan Nepal Ke India Dan Peran Jejaring Feminis Transnasional," *Nation State Journal of International Studies* 3, no. 2 (2020): 258–75, <https://doi.org/10.24076/nsjis.2020v3i2.338>.

⁶³ Global Slavery Index. 2024. *Modern Slavery in India*. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/india/>

juga mengelola saluran telepon bantuan anak, operasinya dialihkan dari LSM yang ditunjuk ke layanan pemerintah pada tahun 2022. Pemerintah juga menjalankan dan mendanai layanan dukungan, namun pendanaan dan pengawasan tidak mencukupi selama periode penilaian dengan adanya laporan tentang kondisi yang buruk, pelecehan, dan perdagangan manusia kembali muncul dari tempat penampungan.⁶⁴

Pemerintah pusat bergantung pada pemerintah negara bagian untuk menegakkan proses peradilan pidana. Pada tahun 2022, Komisi Nasional untuk Perempuan membentuk unit untuk memperkuat kapasitas AHTU, yang ada di sebagian besar distrik, tetapi tidak memiliki sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kejahatan perbudakan modern, termasuk kerja paksa. Di tempat-tempat di mana kejahatan perbudakan modern diselidiki dan dituntut, tingkat pembebasannya tinggi, dan skema kompensasi korban kurang dimanfaatkan.⁶⁵

Sementara beberapa korban dapat memberikan kesaksian melalui konferensi video, perlindungan dan dukungan keuangan yang tidak memadai dilaporkan mencegah korban lain berpartisipasi dalam proses pengadilan. Rancangan undang-undang antiperdagangan manusia yang

⁶⁴ D I Bawah and Umur Tahun, "HUMAN TRAFFICKING PADA PENJUALAN PEREMPUAN," 2024.

⁶⁵ Monica Vira Ajeng Kristanti, "Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) Dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.20845>.

telah disusun sejak tahun 2018 bertujuan untuk memperluas investigasi, bantuan bagi korban, dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat; namun, ada kekhawatiran bahwa tidak semua korban dilindungi dari hukuman atas kejahatan yang mereka terpaksa lakukan.⁶⁶

5. Memperketat Penjagaan Batas Negara

Kementerian Dalam Negeri India membentuk Pusat Pasukan Bersenjata Kepolisian India atau *Central Armed Police Forces (CAPF)* yang memiliki tujuh organisasi kepolisian yang masing-masing organisasi tersebut memiliki peran untuk membela kepentingan nasional terutama terhadap ancaman internal dan internasional. Organisasi tersebut adalah (Ministry of Home Affairs, 1986):

- a. *Assam Rifles (AR)*
- b. *Border Security Force (BSF)*
- c. *Central Industrial Security Force (CISF)*
- d. *Central Reserve Police Force (CRPF)*
- e. *Indo Tibetan Border Police (ITBP)*
- f. *National Security Guard (NSG)*
- g. *Sashastra Seema Bal (SSB)*

Dari ketujuh organisasi tersebut, organisasi yang memiliki peran terhadap kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan manusia adalah *BSF (Border Security Force)*. *BSF (Border Security Force)* dibentuk oleh

⁶⁶ F M Lubis, S Salsabila, and ..., "Respon SAARC Terhadap Pengimplementasian CEDAW Dalam Gerakan Melawan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Mazhab Kopenhagen," *Jurnal PIR: Power ...* 7, no. 2 (2023): 134–46.

pemerintah India pada tahun 1965, dibawah *Ministry of Home Affairs* atau Kementerian Dalam Negeri India. Dibentuknya BSF (*Border Security Force*) bertujuan untuk menjaga daerah perbatasan India-Pakistan dan India Bangladesh. BSF adalah satu-satunya yang memiliki pasukan air, pasukan udara dan resimen artileri. BSF disebut sebagai Garis Pertahanan Pertama di wilayah India. BSF juga dipekerjakan untuk Tugas Keamanan Internal (*Internal Security Duties*) dan tugas hukum dan ketertiban lainnya atas permintaan pemerintah.⁶⁷

Lalu lintas masuk dan keluar wilayah menjadi titik rawan terjadinya kejahatan perdagangan orang melalui pengiriman pekerja migran. Pengiriman pekerja migran tanpa dokumen resmi yang ditetapkan perundang-undangan berpotensi menjadi titik awal perdagangan orang. Dalam upaya mencegah perdagangan orang melalui modus pengiriman tenaga migran nonprosedural, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai organ pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan pengawasan Keimigrasian. Melakukan penjagaan perbatasan adalah upaya untuk pencegahan perdagangan manusia terutama dalam hal ini adalah wanita. Selain itu melakukan pemantauan pada perbatasan guna mengutas kebijakan sosial mengenai kemanusiaan, pembangunan, dan isu militerisasi dengan berbagai macam pihak seperti media, kelompok HAM, tenaga kerja, dsb. Ketiga, jaringan TFN (*Transnational Feminist Network*) saling

⁶⁷ BSF (Border Security Force)., "No Title," 2023, <https://www.mha.gov.in/en/border-security-force>.

terhubung satu sama lain dan ia mencakup wilayah lokal, nasional, regional, dan transnasional.⁶⁸

Pemerintah mempertahankan upaya penegakan hukum anti-perdagangan manusia. Hukum India mengkriminalisasi perdagangan seks dan beberapa bentuk perdagangan tenaga kerja. Pasal 370 KUHP India IPC (*indian penal code*) mengkriminalisasi pelanggaran perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi yang mencakup tindakan eksploitasi fisik atau segala bentuk eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, dan penghambaan. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur perdagangan tenaga kerja. Pasal 370 menetapkan hukuman yang berkisar antara tujuh hingga 10 tahun penjara dan denda untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa, dan 10 tahun hingga penjara seumur hidup dan denda untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak-anak.⁶⁹

⁶⁸ Suwarno, Fatma Yusuf Eko. 2020. *Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional*. *Journal of International Studies*. 3 (2).

⁶⁹U.S Department of State. 2023. 2023 Trafficking in Persons Report: India. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/india/>